

**PELAKSANAAN PENGAWASAN
DALAM PENYELENGGARAAN JASA PERPARKIRAN
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG**

Skripsi

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**BUDI SUTRISNO
TM/NIM 2008 / 05154**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

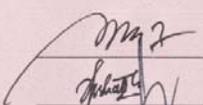
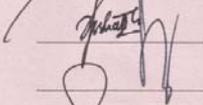
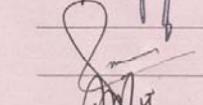
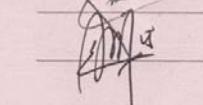
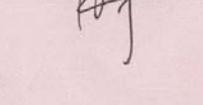
Pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2013 pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

**Pelaksanaan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Jasa Perparkiran
Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan
Kota Padang**

Nama : Budi Sutrisno
TM/NIM : 2008/05154
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2013

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	
Sekretaris	: Siska Sasmita, S.IP, MPA	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	
Anggota	: Dra. Al Rafni, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang.

Oleh: Budi Sutrisno, 2008 – 05154.

Pelaksanaan penyelenggaraan jasa perparkiran membutuhkan pengawasan yang mampu mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan jasa perparkiran agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta menjadi kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Pengawasan merupakan suatu alat kontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Latar belakang penelitian ini adalah tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir di Kota Padang, penataan parkir yang menyebabkan kesemrawutan tatanan kota dan ketidakdisiplinan petugas juru parkir dalam melaksanakan pelayanan jasa perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan jasa perparkiran oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan jasa perparkiran, dan apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan jasa perparkiran di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive sampling*. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Pada dasarnya pengawasan sudah terlaksana tapi belum sepenuhnya terlaksanan dengan baik, dengan tidak terpenuhinya indikator pengawasan seperti tidak adanya pedoman pelaksanaan pekerjaan, penjelasan cara pelaksanaan pekerjaan hanya dilakukan secara lisan, tidak optimalnya penilaian terhadap hasil kerja, analisa timbulnya kesalahan tidak dilakukan secara rutin, penetapan sanksi tanpa penerapan sesuai apa yang telah ditetapkan, prosedur yang telah ada tidak dianalisa kembali serta masih kurangnya pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaksana. Kendala yang dihadapi oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang adalah tidak proposionalnya jumlah personil yang dimiliki oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang dengan titik parkir di Kota Padang, kurangnya fasilitas pengawasan dan tatanan Kota yang sudah tidak teratur. Upaya yang dilakukan dengan dengan cara Kepala UPT Perparkiran ikut turun langsung kelapangan guna memberikan bimbingan teknis pengarahan dan petunjuk kepada petugas penyelenggara jasa perparkiran di lapangan serta memberi pengarahan dan petunjuk.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Jasa Perparkiran Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang”**. Serta Shalawat dan salam yang selalu dilimpahkan untuk Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis atas segala do'a, semangat, dorongan, perhatian dan curahan kasih sayangnya baik dari segi moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.
4. Drs. Karjuni Dt. Maani M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

5. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku pembimbing I yang telah membimbing, membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Siska Sasmita, S.IP, MPA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Drs. Suryanef, M.Si., Drs. Ideal Putra, M.Si., Dra, Al Rafni, M.Si selaku Tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak M. Sidik, S.Sos selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang beserta staf yang telah banyak membantu penulis.
9. Orang terdekat dan teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2008 yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, terimakasih atas kebaikannya.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Fokus Penelitian	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Konsep Pengawasan	12
2. Tujuan dari Fungsi Pengawasan.....	15
3. Langkah-langkah dalam proses pengawasan.....	17
4. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian.....	21
5. Retribusi Parkir.....	22
a . Parkir	25
b . Ketentuan Penyelenggaraan parkir	26
B. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	40
B. Temuan Khusus.....	55
C. Pembahasan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Parkir dari Tahun 2009 s/d 2011 dari UPT Perparkiran Kota Padang.....	4
2. Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian.....	33
3. Tabel 4.1 Daftar Pegawai UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang.....	46
4. Tabel 4.2 Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	53

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Tahap-tahap dalam proses pengawasan.....	18
2. Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	30
3. Gambar 4.1 Potret kondisi pasar raya Padang.....	41
4. Gambar 4.2 Kondisi kekacauan perparkiran di pasar raya Padang.....	42
5. Gambar 4.3 Struktur Organisasi.....	45
6. Gambar 4.4 Kondisi perparkiran Tepi Jalan Umum depan gedung Balaikota Padang.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2012
2. Keputusan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012
3. Contoh Karcis resmi yang di sah kan oleh Pemerintah Kota Padang
4. Pedoman wawancara
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kakan Kesbang dan Linmas Kota padang
7. Surat Keterangan selesai penelitian
8. Gambar-gambar yang berhubungan dengan penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan azas ini pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi yang diberikan memposisikan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama atas kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang di berikan tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketentuan pemberian otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan Kota harus dimaknai, bahwa tidak semua daerah memiliki potensi ekonomi dan sosial yang sama serta memiliki basis yang kuat. Sebagian daerah memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar, sebaliknya ada sejumlah daerah yang memiliki basis ekonomi yang terbatas. Hal inilah yang sangat berpengaruh pada kinerja daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun demikian setiap daerah memiliki keistimewaan dan kekhasan tersendiri tinggal bagaimana daerah mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada. (Bambang 2001 : 10)

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia daerah otonomi merupakan daerah yang diberi hak otonomi agar daerah

tersebut mampu mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. J.B. Sumarlin menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan itu perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi auditee (organisasi, pemerintahan dan Negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Kemampuan daerah dalam menyelesaikan urusan yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah yang di atasnya termasuk kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahannya.

Salah satu sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemungutan retribusi. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (64) UUNo. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

”Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pada pemerintah daerah banyak terdapat jenis retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat menjanjikan guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah, diantaranya adalah retribusi parkir yaitu pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bis umum dan barang maupun kendaraan pribadi serta fasilitas lainnya dilingkungan Pemerintahan Kota Padang (Perda Kota Padang No 12 Tahun 2001)

Seiring dengan meningkatnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat di Kota Padang mengakibatkan peningkatan pada jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat. Hal ini tentunya akan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan lahan-lahan parkir, yang akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan yang mampu mengoptimalkan retribusi parkir agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta menjadi kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Pentingnya tugas pengawasan dalam suatu organisasi, karena pengawasan merupakan suatu alat kontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam organisasi. Pelaksanaan pengawasan diciptakan untuk mencegah terjadinya kecurangan keuangan dan juga membantu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, agar berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang terlihat realisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang terdapat dalam laporan tahunan penerimaan retribusi parkir pada Tahun 2009 – 2011 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada laporan Tahunan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang yang peneliti gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Penerimaan Retribusi Parkir dari Tahun 2009 s/d 2011 dari UPT Perparkiran Kota Padang

Tahun Penerimaan Retribusi	Target (1 Tahun)	Realisasi penerimaan	Persentase penerimaan retribusi parkir terealisasi (%)
2009	Rp. 2.764.317.632,-	Rp. 1.362.411.500,-	47,98 %
2010	Rp. 2.764.317.632,-	Rp. 1.048.268.500,-	37,92 %
2011	Rp. 2.800.000.000,-	Rp. 1.192.549.000,-	42,59 %

Sumber : UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011, realisasi penerimaan retribusi dari segi perparkiran tidak ada yang mencapai 50%, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD dari segi retribusi parkir jauh dari target yang diinginkan. Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Padang masih kurang maksimal dalam menggali potensi daerah dari sektor retribusi parkir seiring dengan meningkatnya taraf perekonomian masyarakat dan pesatnya perkembangan pembangunan tempat-tempat pelayanan umum seperti supermarket, pasar/pusat perdagangan dan lain sebagainya. Agar potensi daerah dari

penerimaan retribusi Parkir ini dapat mencapai hasil maksimal dengan jangkauan yang lebih luas, serta bisa meningkatkan kontribusinya bagi PAD, maka dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari instansi yang terkait.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang dirasakan belum optimal oleh masyarakat pengguna jasa parkir, hal ini dikeluhkan oleh salah seorang pengguna jasa perparkiran di Kota Padang yaitu Bapak Dedi, berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Dedi sebagai salah seorang pengguna jasa perparkiran, Bapak Dedi mengeluhkan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap petugas penyelenggara parkir di lapangan yang dengan sesuka hati menetapkan tarif parkir dan petugas tidak juga memberikan tanda bukti parkir seperti karcis parkir kepada pemilik kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 12 Tahun 2001.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa perparkiran di lapangan terdapat beberapa permasalahan seperti masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan banyak terdapat lahan parkir yang tidak diatur sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesemrawutan yang berdampak buruk terhadap tatanan kota. Selain itu, sesuai dengan pemberitaan surat kabar Padang Ekspres (Selasa, 24 Mei 2011 : 9) mengatakan adanya dugaan kebocoran pada penerimaan retribusi disekeliling SKPD di Kota Padang yang salah satunya adalah penerimaan retribusi parkir pada Dinas Pehubungan. Proses pemungutan retribusi ini masih banyak mengalami kendala-kendala seperti adanya persoalan 'orang bagak' (pihak yang tidak berwenang dalam pemungutan retribusi parkir) yang menguasai

sejumlah 'lahan basah' di beberapa lokasi yang mengakibatkan tidak maksimalnya pemerintah dalam melakukan penarikan retribusi parkir. "Lahan basah" yang dimaksud adalah wilayah-wilayah padat seperti Pasar Raya, Permindo dan beberapa lokasi lainnya.

Permasalahan di atas menunjukkan masih lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang. Penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang membutuhkan kerja keras dan komitmen semua pihak khususnya UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang sehingga dapat menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa perparkiran

Permasalahan lain yang terjadi pada pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di lapangan adalah masih lemahnya kesadaran dan kedisiplinan para petugas juru parkir untuk mengatur kendaraan agar parkir di tempat yang telah ditetapkan oleh rambu-rambu yang telah disediakan sehingga menimbulkan kesemrautan dalam pengaturan parkir yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di perkotaan, serta tidak diberikannya tanda terima pembayaran penarikan retribusi (karcis) parkir yang dibayarkan kepada pemilik kendaraan.

Menurut Rasyid dalam Mahadam Labolo (2006:25) tujuan dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban agar masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Tujuan pemerintah itu akan dapat dijalankan dan dicapai apabila di dalam organisasinya berlangsung sistem manajemen yang efektif, efisien dan inovatif. Dalam gerak suatu organisasi, manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan Dharma Setyawan Salam (2004:10) manajemen merupakan suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Manajemen bergerak secara dinamis pada semua organisasi, termasuk organisasi pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat.

Masyarakat tentu berharap pengawasan yang intensif UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang mampu melakukan dan mewujudkan tata kelola penyelenggaraan perparkiran yang lebih tertib dan teratur di Kota Padang. Hal tersebut harus didorong oleh terwujudnya aparatur pemerintah yang bekerja efektif dan efisien. Seperti yang diungkapkan oleh Widjaja (2008:71) yang menyatakan aparatur yang efektif dan efisien adalah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan dana yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sadar akan kepentingan pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

Apabila jasa perparkiran tidak terselenggara dengan baik maka hal itu akan memberikan pengaruh terhadap kualitas lingkungan dan mengganggu aktivitas Kota, khususnya pada tempat-tempat publik di Kota Padang.

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini. Yang akan penulis tuangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang”** yang nantinya dapat menciptakan pengawasan yang optimal dan lebih baik dalam rangka pelayanan dan menciptakan kepuasan masyarakat dalam menikmati penyediaan jasa perparkiran di Kota Padang.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.

a. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka masalah yang teridentifikasi penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang belum maksimal menggali potensi daerah dalam penerimaan retribusi parkir.
2. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa perparkiran.
3. Timbulnya kesemrawutan tatanan kota akibat lahar parkir yang tidak tertata rapi.
4. Masih lemahnya kesadaran dan kedisiplinan para petugas juru parkir dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan parkir di lapangan.

b. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini, untuk membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian, maka penulis membatasi masalah pada Pelaksanaan

Pengawasan pada Penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan KotaPadang di titik-titik jalan padat kendaraan seperti pasar baru, jalan pasar raya, jalan permindo, jalan sandang pangan, jalan M.Yamin dan jalan Imam Bonjol.

c. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh UPT Perparkiran KotaPadang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh UPT Perparkiran KotaPadang?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan pada penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh UPT Perparkiran KotaPadang?

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan jasa perparkiran oleh UPT Perparkiran di Kota Padang dalam rangka menciptakan ketertiban khususnya di wilayah padat kendaraan serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan jasa perparkiran.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang dikemukakan, maka peneliti bertujuan :

1. Mendapatkan gambaran tentang Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan KotaPadang.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Jasa Perparkiran.
3. Memperoleh deskripsi tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pengawasan pada penyelenggaraan Jasa Perparkiran oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan KotaPadang.

E. Manfaat penelitian

Adapun mafaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam mengembangkan konsep Azas-azas Manajemen, Manajemen Publik, dan Administrasi Perpajakan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang sehingga mampu melahirkan solusi-solusi yang konstruksional sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanannya terhadap masyarakat.